

TATA KELOLA BERKELANJUTAN: STUDI TENTANG IDEALITAS MODEL TATA KELOLA DAERAH SULAWESI SELATAN, INDONESIA

Abdillah^{1*}, Zahra Ahmadi²

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia¹

University of Tehran, Kish International Campus, Iran²

*E-mail: abdillah18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

To overcome the conceptual ambiguity of Good Governance, based on the reinterpretation of the discourse 'from government to governance', this study uses analysis from Lange et al. (2013) on sustainable governance that focuses on political processes, institutional structures, and policies in the government of South Sulawesi as an industrial area of Eastern Indonesia. This study uses a qualitative-exploratory research method with a case study approach, using interactive analysis techniques through data collection, data reduction, data verification, data presentation, and conclusions to obtain the best findings. The results of this study find that sustainable governance in the South Sulawesi Regional Government applies a multi-dimensional approach that considers the political (political) process, government structure and policies that adequately capture the complexity of the phenomenon of governance (local governance) in Eastern Indonesia). With a good explanation of the concept with a sustainable governance model with complex multi-actor interactions/cooperation between local political elites, industry (private) & civil society, as well as on the process of institutional structural interaction through what is called governance collaboration. This study contributes to recommending a sustainable governance model for local government with local wisdom of Bugis-Makassar culture in the value of siri na pacce (shame) as a value with high responsibility as a government in the South Sulawesi Government.

Keywords: *New Government; Sustainable Development Governance; Regional Governance Model; Development Disparity*

ABSTRAK

Untuk mengatasi ambiguitas konseptual Good Governance, berdasarkan reinterpretasi wacana 'from government to governance', penelitian ini menggunakan analisis dari Lange et al. (2013) tentang tata kelola berkelanjutan yang berfokus pada proses politik, struktur kelembagaan, dan kebijakan di pemerintahan Sulawesi Selatan sebagai kawasan industri Indonesia Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan temuan terbaik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan yang berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menerapkan pendekatan multi-dimensi yang mempertimbangkan proses politik

(politik), struktur pemerintahan dan kebijakan yang cukup menangkap kompleksitas fenomena pemerintahan (pemerintahan lokal) di Timur. Indonesia). Dengan penjelasan konsep yang baik dengan model pemerintahan yang berkelanjutan dengan interaksi/kerjasama multi aktor yang kompleks antara elit politik lokal, industri (swasta) & masyarakat sipil, serta pada proses interaksi struktural kelembagaan melalui apa yang disebut kolaborasi tata kelola. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk merekomendasikan model pemerintahan yang berkelanjutan bagi pemerintah daerah dengan kearifan lokal budaya Bugis-Makassar dalam nilai *siri na pacce* (malu) sebagai nilai dengan tanggung jawab yang tinggi sebagai pemerintah di Pemerintah Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Pemerintah Baru; Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan; Model Tata Kelola Wilayah; Disparitas Pembangunan

PENDAHULUAN

Ada konsensus luas dalam perdebatan ilmiah dalam politik bahwa 'pemerintahan' adalah domain penting untuk realisasi proses transformasi masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan (Callway, 2013; van Zeijl-Rozema, et al., 2008; Kemp, dkk., 2005; Komisi Eropa, 2009). Beberapa penulis menganggap kurangnya ide keberlanjutan yang mencirikan pola pembangunan bersama sebagai krisis tata kelola (Adger & Jordan, 2009; Farrell et al., 2005; Van Zeijl-Rozema et al., 2008). Dengan latar belakang tersebut, melihat lebih jauh praktik tata kelola pemerintahan harus diorientasikan kembali ke SD (*Sustainable Development*). Namun, tetap menjadi pertanyaan umum tentang bagaimana mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga keberlanjutan dapat dipupuk, atau seperti yang dikatakan Lafferty (2004: 2) 'di mana, kapan, dan bagaimana mempromosikan bentuk-bentuk lain dari pembangunan berkelanjutan?'

Pemerintahan *muncul sebagai* konsep dalam ilmu politik, serta ilmu keberlanjutan, dan bidang lainnya dalam menanggapi meningkatnya kesadaran bahwa pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang relevan dalam pengelolaan masalah sosial (lange, 2013). Dalam literatur pemerintahan, dikatakan bahwa selama dekade terakhir pemerintahan semakin menjadi tanggung jawab bersama negara, pasar, dan masyarakat sipil (Kooiman, 2003; Pierre & Peters, 2019; Rhodes, 1997; Stoker, 2018). Sebagai hasil dari perubahan dalam pemerintahan ini, berbagai model pemerintahan yang hidup berdampingan telah muncul dalam masyarakat modern.

Melihat catatan laporan dokumen evaluasi tentang gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama di Provinsi Sulawesi Selatan adalah "Sulawesi Selatan belum mencapai kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat" (Pemprov Sulawesi Selatan, 2018). Berdasarkan indikator kinerja pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang terkait dengan misi dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Permasalahan tata kelola pembangunan daerah di provinsi Sulawesi Selatan adalah:



Gambar 1. Masalah Utama Tata Kelola Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

Sumber: Diolah dari RPJMD 2018-2023 Sulawesi Selatan, 2021

Kita dapat menggambarkan permasalahan utama tata kelola pemerintahan pembangunan di Pemerintahan Sulawesi Selatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 di atas, yaitu: (1) Tata Kelola pemerintahan masih perlu diperbaiki; (2) Pembangunan infrastruktur masih perlu ditambah; (3) Pusat pertumbuhan ekonomi masih perlu dikembangkan; (4) Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan; (5) Kesenjangan sosial yang masih tinggi perlu dikurangi; (6) Produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam masih perlu dioptimalkan. Rangkaian permasalahan ini nantinya dapat menjadi kerangka dasar penetapan perencanaan kebijakan dan acuan evaluasi tata kelola pemerintahan berkelanjutan (Pemprov Sulawesi Selatan, 2018).

Penting untuk mengembangkan pemerintahan berkelanjutan di Sulawesi Selatan mengingat kesenjangan regional yang tinggi, pengembangan kegiatan ekonomi dan karakteristik wilayah yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahadismal, et al. (2014) yang menyatakan bahwa tingkat disparitas antar daerah dari tahun 2007 hingga 2011 masih sangat tinggi meskipun GRDP meningkat setiap tahunnya dan faktor penyebab disparitas regional adalah PDRB per kapita provinsi yang tidak merata setiap tahunnya, proporsi kontribusi ketimpangan atau kontribusi disparitas yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, lebih disebabkan oleh antar kabupaten sendiri (didalamnya) pada tahun 2007 hingga 2009 dan antar kota dengan kabupaten (antara) pada tahun 2010 dan 2011 dan masih terjadi disparitas antar daerah (pemerintah Sulawesi Selatan, 2018; Hasbi, A.M., & Semmaila, B., 2018). Sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap kegiatan ekonomi daerah pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan dimana Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Bone merupakan daerah yang memiliki perkembangan ekonomi paling berkeadilan dibandingkan daerah lain namun memberikan perbedaan diversifikasi yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan disparitas antar daerah. Luas wilayah berdasarkan kemampuan lahan yang dapat dikembangkan di sektor pertanian adalah 63 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan (Ahadismal, dkk., 2014).

Cita-cita dalam membangun pemerintahan yang ideal adalah keinginan seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Sulawesi Selatan. Penerapan regulasi yang efektif dalam mengembangkan role model bagi pemerintah daerah perlu dilakukan mengingat tingginya disparitas dalam pembangunan daerah, ketimpangan sosial di daerah, dan ketimpangan pemerintah yang tidak efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahan, hal ini menjadi kabar buruk bagi pemerintah (Hasbi/Semmaila, 2018). Cita-citapemerintahan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, efisiensi birokrasi pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, dan terwujudnya kesejahteraan sosial daerah, untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal (Azfar, et al., 2018; Meier, dkk., 2019). Hal ini telah dicoba di Sulawesi Selatan sebagai alasan penelitian ini

dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan model tata kelola pemerintahan sekaligus membentuk model tata kelola baru yang berkelanjutan yang akan berkontribusi pada implementasi pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan maupun di pemerintah pusat Indonesia.

Pemerintahan lokal daerah Sulawesi Selatan seperti Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur menjalin Kerjasama dengan PT Vale Tbk untuk mendorong kemandirian masyarakat, peretumbuhan ekonomi, dan pembangunan fasilitas public, dan pariwisata sebagai bentuk untuk mengurangi disparitas yang tinggi dalam pembangunan daerah Sulawesi selatan. Bukan hanya kolaborasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Tbk di Sulawesi Selatan. Ada Juga kolaborasi Pemerintahan Lokal Kabupaten Pangkep dengan PT Tonasa dan Kolaborasi Pemerintahan Lokal Kabupaten Maros dengan PT Bosowa. Hal ini dilakukang untuk mendorong tata kelola berkelanjutan yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Dimana tiap pemerintahan lokal yang ada di daerah Sulawesi Selatan berkolaborasi dan bermintra dengan industri di bidang, ekonomi, pariwisata, Pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Pada saat yang sama, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi ambiguitas konseptual tata kelola yang umumnya diterapkan, khususnya di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, dengan mengidentifikasi cara-cara yang dapat dibuktikan untuk mendekati model tata kelola yang berkelanjutan. Mempertimbangkan wawasan dari kontribusi program pemerintah dan publikasi tata kelola secara umum, penelitian ini menyajikan kerangka kerja untuk mengkonseptualisasikan model tata kelola yang baik. Ini dibangun di atas penelitian yang dilakukan oleh Lange. dkk. (2014) dengan dimensi yang akan dimasukkan dalam konseptualisasi, menyoroti fitur-fitur utama yang dimungkinkan untuk mengeksplorasi dimensi proses politik (*politik*), struktur kelembagaan (*Struktur Kelembagaan*) dan konten kebijakan (*kebijakan*). Kompleksitas yang melekat pada model tata kelola dengan demikian akan terungkap sebagai hubungan dinamis antara proses politik (*politik*), struktur kelembagaan (*Struktur Kelembagaan*) dan konten kebijakan (*kebijakan*) sebagai

analisis empiris dari model tata kelola dan kesesuaiannya untuk mempromosikan SD (*Pembangunan Berkelanjutan*) (Rogge, K. S., & Reichardt, K. , 2016; Lynn Jr et al., 2001). Semakin baik kompleksitas yang melekat pada model tata kelola dipahami, semakin mudah untuk mengeksplorasi hubungan antara keduanya (Lange et al., 2013; Rogge, K. S., & Reichardt, K. , 2016; Lynn Jr et al., 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan pendekatan fenomenologis (Creswell & Poth, 2016), untuk melihat reinterpretasi wacana 'from government to governance' dalam sebuah penelitian yang mengkaji kompleksitas isu-isu tata kelola pembangunan daerah dalam konsep tata kelola pemerintahan berkelanjutan di Pemerintah Sulawesi Selatan. Penelitian ini akan mengungkap bagaimana dinamika hubungan antara proses politik (politik), struktur kelembagaan (Struktur Kelembagaan) dan isi kebijakan (kebijakan) dalam model tata kelola daerah provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kawasan industry di Indonesia timur, dengan menggunakan teori tata kelola berkelanjutan dari Lange et al (2013). Data dan fakta yang digunakan diperoleh melalui penelitian perpustakaan dengan mempelajari, membaca, mempelajari buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah Sulawesi Selatan, situs website pemerintah daerah Sulawesi Selatan dan sumber data terkait lainnya sehingga menghasilkan penelitian yang berkualitas. Setelah diperoleh, data kemudian dianalisis dan ditafsirkan seperti yang dikembangkan oleh Miles et al. (2018) dengan tahapan pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, verifikasi data, untuk menghasilkan kesimpulan berupa temuan baru yang bermanfaat bagi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Keberlanjutan dengan Tata Kelola Pemerintahan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Tata kelola SD (*Sustainable Development*) dapat dicirikan sebagai proses tata kelola sosial politik yang berorientasi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (Meadowcroft, 2007: 299). Bidang ini mencakup promosi bersama

proses transformasi masyarakat oleh pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat sipil. Proses-proses ini terjadi di berbagai tingkatan (lokal ke internasional), mempengaruhi area kebijakan yang berbeda (misalnya energi, perumahan, atau sektor pertanian), dan mengacu pada beberapa skala temporal.

Di dunia akademis, dua istilah 'keberlanjutan' dan 'tata kelola' berfungsi sebagai jembatan antar disiplin ilmu. Jumlah publikasi yang terdiri dari kedua ide tersebut telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir, menunjukkan meningkatnya relevansi lapangan. Namun, baik keberlanjutan maupun tata kelola dicirikan oleh ambiguitas konseptual (Lange, et al, 2013). Dari Kemp, et al. (2005:13) berpendapat bahwa 'tidak satu pun dari istilah-istilah ini yang belum matang atau didefinisikan dengan jelas. Mungkin yang lebih penting, tumpang tindih antara maknanya yang lebih luas tetap tidak terselesaikan.

Gagasan 'keberlanjutan' menyerukan untuk menghubungkan tujuan politik keadilan global dan wacana terkait tentang pembangunan manusia dengan fakta-fakta sumber daya lingkungan yang terbatas dan ekosistem yang rapuh. Keberlanjutan pada dasarnya adalah istilah hibrida yang menghubungkan normatif (intra dan keadilan antargenerasi) dengan fondasi sistemik (mekanisme interaksi atau proses manusia-alam dalam sistem sosial-ekologis). Selain itu, musyawarah dan negosiasi masyarakat juga masuk dalam SD (*Sustainable Development*) selain aspek-aspek yang berkaitan dengan keadilan (Burger & Christen, 2011).

Sustainable Development diartikan sebagai tujuan kebijakan, dua karakteristik penting dapat diidentifikasi. Pertama, ada kebutuhan untuk mengarahkan proses transformasi sosial yang mendalam yang membutuhkan tindakan pada berbagai skala temporal, spasial dan struktural. Kedua, logika kemudi menunjukkan karakter multidimensi karena tujuan yang tidak pasti dan ambivalen (yang juga dapat berubah dari waktu ke waktu), kebutuhan akan perspektif jangka panjang, dan pertimbangan berbagai tingkatan, sektor dan instrumen kemudi (Baker, 2009; Meadowcroft, 2007). Dengan demikian, pengejaran SD (*Pembangunan Berkelanjutan*) merupakan kasus paradigma untuk apa yang memotivasi pendekatan tata kelola secara umum: sifat pembuatan kebijakan kontemporer yang semakin kompleks, dinamis, dan saling bergantung.

Dengan demikian, konsep SD (*Pembangunan Berkelanjutan*) telah memicu perdebatan tentang tata kelola, karena pelembagaan keberlanjutan telah mendorong serangkaian pengaturan tata kelola baru.

Gagasan 'pemerintah' telah menjadi menonjol dalam perdebatan ilmiah dan politik. Secara umum, ini mengacu pada praktik di mana masyarakat diatur. Sedangkan tata kelola pemerintahan biasanya dipahami sebagai kegiatan yang melakukan 'upaya yang bertujuan membimbing, mengarahkan, mengendalikan, atau mengelola suatu sektor atau aspek masyarakat' (Kooiman, 2003). Secara tradisional, pemerintahan telah dikaitkan dengan pemerintahan (lembaga formal negara), sedangkan 'tata kelola pemerintahan' muncul sebagai konsep untuk memahami dinamika baru dalam pemerintahan (Bevir, 2011; Pierre & Peters, 2019), terutama bentuk non-hierarkis seperti pengaturan jaringan di mana batas-batas antara sektor publik dan swasta kabur (Bellamy, 2011). Pengaturan ini sering ditandai dengan interaksi multi-aktor yang kompleks di seluruh negara bagian, pasar, dan masyarakat sipil dan terjadi di berbagai tingkatan (Bache & Flinders, 2016; Hooghe & Marks, 2001). Pada tabel 2 di bawah ini, akan dipaparkan uraian mengenai proses tata kelola sosial politik SD (*Pembangunan Berkelanjutan*) di Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Proses Tata Kelola Sosial Politik tentang Orientasi Pembangunan Berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Tidak	Bentuk Pembangunan Berkelanjutan	Masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
1.	Proses transformasi masyarakat oleh pemerintah	1. Pengelolaan potensi pengembangan wilayah dan pengelolaan daerah rawan bencana.
2.	Pelaku Pasar (Bisnis individu dan perusahaan besar)	1. Tata Kelola Kemampuan Ekonomi Daerah. 2. Tata Kelola Sarana Daerah/Prasarana Daerah. 3. Tata kelola investasi di kawasan ini 4. Tata Kelola Sumber Daya Manusia

3.	Masyarakat Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Masyarakat. 2. Tata Kelola Kesejahteraan Masyarakat. 3. Tata kelola seni, budaya, dan olahraga komunitas.
----	------------------	--

Sumber: Peneliti dari RPJMD Sulsel 2018-2023, 2022

Menurut Lange, dkk. (2013) relevansi antara Tata Kelola dan Keberlanjutan, melihat alternatif untuk mengeksplorasi hasil secara langsung, yaitu menyelidiki output dan dampak tata kelola (tujuan yang disepakati dari aktor dan tindakan kolektif mereka) untuk mendapatkan wawasan tentang hasil yang (tidak) berkelanjutan. Lebih tepatnya, kami berpendapat bahwa potensi keberlanjutan dari mode tata kelola dapat dieksplorasi secara empiris sebagai berikut. Mode tata kelola harus memenuhi dua persyaratan untuk berkontribusi pada SD (*Pembangunan Berkelanjutan*): (i) isinya harus konsisten dengan tujuan yang berasal dari pengejaran SD (*Pembangunan Berkelanjutan*), yaitu, mencerminkan prasyarat fungsional dan normatif SD (*Pembangunan Berkelanjutan*); dan (ii) beberapa bentuk tindakan kolektif transformatif harus didorong (seperti perubahan dalam manajemen infrastruktur atau perilaku konsumen), karena hanya dengan begitu tata kelola akan berdampak nyata pada keberlanjutan dalam praktiknya.

Menjelajahi kedua fitur tersebut, seseorang dapat meneliti apakah model tata kelola tertentu umumnya lebih cocok untuk mengarah pada hasil yang berkelanjutan. Karena mengeksplorasi hasil secara langsung hanya memicu kesulitan, penelitian meta-framework dalam Lange, et al. (2013) memfasilitasi analisis hasil dan dampak tata kelola saat mereka mengungkapkan interaksi proses politik, struktur kelembagaan, dan konten kebijakan. Alhasil, kerangka kerja ini tidak hanya secara umum cocok untuk mempelajari fenomena tata kelola pemerintahan tetapi juga sangat cocok sebagai dasar untuk mengkaji secara empiris hubungan antara mode tata kelola dengan *Pembangunan Berkelanjutan*.

Fenomena di pemerintahan lokal daerah Sulawesi Selatan seperti Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang menjalin Kerjasama dengan PT Vale

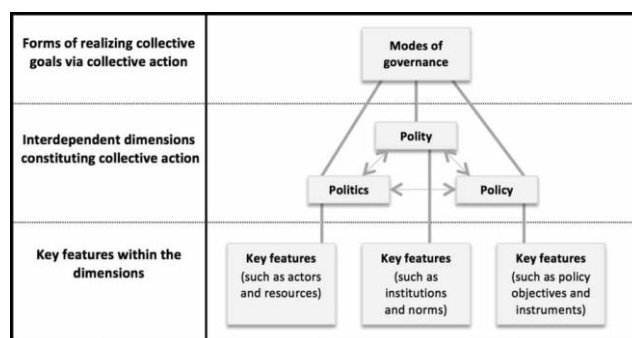
Tbk untuk mendorong kemandirian masyarakat, peretumbuhan ekonomi, dan pembangunan fasilitas public, dan pariwisata sebagai bentuk untuk mengurangi disparitas yang tinggi dalam pembangunan daerah Sulawesi selatan. Bukan hanya kolaborasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Tbk di Sulawesi Selatan. Ada Juga kolaborasi Pemerintahan Lokal Kabupaten Pangkep dengan PT Tonasa dan Kolaborasi Pemerintahan Lokal Kabupaten Maros dengan PT Bosowa. Hal ini dilakukang untuk mendorong tata kelola berkelanjutan yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Dimana tiap pemerintahan lokal yang ada di daerah Sulawesi Selatan berkolaborasi dan bermintra dengan industri di bidang, ekonomi, pariwisata, Pembangunan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Tata Kelola seperti ini menjadi ambigu di Sulawesi selatan dengan dilemma antara, pembangunan daerah oleh pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan, Kepentingan Pasar Industri, Aspirasi dan kepentingan Masyarakat desa, dan ancaman terhadap kelestarin Lingkungan.

Mengkonseptualisasikan Model Tata Kelola Berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

Sangat mirip dengan gagasan 'pemerintahan', tidak ada definisi 'cara pemerintahan' yang diterima secara universal (Homeyer, 2006; Diedrichs, dkk., 2011). Namun, ada sedikit konsensus tentang model pemerintahan apa sebenarnya dan seberapa jauh mereka telah berubah selama beberapa tahun terakhir (Smismans, 2006). Beberapa penulis memahami 'model pemerintahan' pada tingkat masyarakat yang sangat abstrak dan agregat. Istilah ini kemudian mengacu pada tiga tipe ideal umum yaitu 'hierarki', 'pasar', dan 'jaringan' (Lowndes & Skelcher, 1998). Namun, memahami pengaturan tata kelola dunia nyata (dan hubungannya dengan SD) menuntut melampaui jenis abstrak tersebut. Penjelasan kategoris yang lebih rinci diperlukan untuk memahami kondisi untuk mewujudkan tujuan kolektif.

Langkah pertama yang disarankan oleh Lange, dkk. (2013) menuju kejelasan yang lebih besar adalah mengusulkan definisi kerja untuk 'model tata kelola'. Menurut definisinya tentang 'pemerintahan', tujuan inti pemerintahan

bermuaara pada mewujudkan tujuan kolektif melalui tindakan kolektif (Stoker, 1998; Lange et al 2013). Akibatnya, dalam mendefinisikan 'model ideal pemerintahan' sebagai bentuk mewujudkan tujuan kolektif melalui tindakan kolektif'.



Gambar 2. Model Tata Kelola Berkelanjutan Dari Lange et al. (2013)

Sumber: Disiapkan oleh para peneliti dari berbagai sumber, 2022

Tiga model pemerintahan ideal-tipikal pada gambar 2 di atas berbeda satu sama lain dalam sejauh mana aktor negara dan non-negara terlibat. Mengacu pada berbagai cara di mana para aktor ini dapat bekerja sama, lebih lanjut Lange dkk. (2013) menggambarkan model co-governance ke dalam *Closed co-governance* dan *open co-governance* (yang pertama menggambarkan bentuk yang lebih terbatas, terstruktur, dan tetap dan yang terakhir adalah bentuk pemerintahan bersama yang lebih fleksibel dan otonom). Hal ini menghasilkan diferensiasi empat model tata kelola yang membentuk kontinum. Menurut Arnout et al. (2012), mereka menyempurnakan mode mereka melalui apa yang disebut 'pendekatan penetapan kebijakan'. Ini mengarah pada operasionalisasi dimensi dalam hal aktor, kekuasaan, dan aturan (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Model Tata Kelola Berkelanjutan Arnouts et al. (2012)

	Pemerintahan hierarkis	Tata kelola bersama yang tertutup	Tata kelola bersama yang terbuka	Pemerintahan sendiri
Aktor	Terutama aktor pemerintah	Pilih grup aktor campuran	Grup aktor campuran besar	Terutama aktor non-pemerintah

Kekuatan Aturan	Dengan paksaan pemerintah	Mengumpulkan kerja sama terbatas	Kolaborasi fleksibel terdistribusi	Dengan diperkenalkannya Non-pemerintah
------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--

Sumber: Diolah dari Arnouts, et al. (2012), 2022

Secara definisi seperti yang dibahas di atas, dalam melihat 'model tata kelola' sebagai pengaturan tata kelola yang mencakup berbagai fitur utama yang dikelompokkan di sepanjang dimensi pemerintahan yang berbeda yaitu proses politik, struktur kelembagaan, dan konten kebijakan. Selain itu, Menurut Lange et al. (2013) menghindari terminologi yang menonjol dari model pemerintahan 'baru' karena beberapa model mungkin secara historis relatif baru di beberapa sektor tetapi telah menjadi praktik lama dalam konteks lain (Backstrand et al., 2010). Berdasarkan klarifikasi terminologi ini, untuk membahas tugas mengkonseptualisasikan model tata kelola. Penelitian ini melihatnya dalam tiga langkah. Karena keragaman model pemerintahan kontemporer yang dihasilkan dari berbagai perubahan pemerintahan yang kompleks selama beberapa dekade terakhir, model tata kelola berkelanjutan dipilih sebagai model ideal untuk melaksanakan praktik pemerintahan lokal di Sulawesi Selatan dengan melihat interaksi proses politik, struktur kelembagaan, dan konten kebijakan.

Gambaran dinamika proses politik di Sulawesi Selatan yang menjadi ciri model pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan

Dapat dikatakan bahwa model pemerintahan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan adalah model kolaborasi tradisional kekerabatan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan bentuk proses politik yang menjadi ciri model pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan. Proses ini seperti yang dinyatakan oleh Bache & Flinders (2016) ditandai dengan interaksi multi-aktor yang kompleks di seluruh negara bagian, pasar, dan masyarakat sipil dan terjadi di berbagai tingkatan. Lebih lanjut, proses politik ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana tata kelola model pemerintahan berkelanjutan dengan proses pembangunan berkelanjutan dapat dilihat, sehingga dapat dilihat model tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

Melihat apa yang ditemukan Jurdi (2019) dalam penelitiannya tentang pergeseran dan konfigurasi politik setelah hasil eksi legislatif 2019 tentang dinamika politik di Sulawesi Selatan. Ia menyimpulkan, dinamika politik di Sulawesi Selatan pasca Pemilihan Umum 2019 di Sulawesi Selatan mengakibatkan pergeseran posisi elit, dari total 85 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, 59 merupakan pendatang baru (yang pertama terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi), hanya 26 petahana yang masih terpilih. Pergeseran posisi ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran politik warga negara, juga dipengaruhi oleh praktik klientelisme dan patronase. Sejumlah elite terpilih adalah kandidat yang tidak terlalu mengakar kuat, juga bukan elit yang menonjol di masyarakat, melainkan faktor "X" yang membawa sejumlah calon ke DPRD provinsi Sulawesi Selatan (Jurdi, 2019; Hasbi, A.M., & Semmaila, B., 2018).

Menurut Jurdi (2019), in pemilu serentak legislatif 2019 di Sulawesi Selatan, sejumlah fenomena unik dan menarik terjadi terkait pergeseran kekuasaan elit politik. Pergeseran politik yang terjadi memiliki makna paradoks antara isu teologi agama, isu ekonomi, integrasi sosial, dan isu kemanusiaan lainnya dengan kecenderungan memilih wakil rakyat dalam e leksi 2019 yang tidak berdasar. Gagasan-gagasan politik yang muncul dalam e leksi-leksi imultaneous 2019 relatif tidak ada secara masif di ruang politik, pada kenyataannya, isu-isu dan wacana politik dari p2019 e lections jauh lebih kuat dan dominan. Pemilihan partai politik dalam pemilu legislatif merupakan hasil pertemuan antara berbagai aspek, antara lain hubungan antara berbagai wacana politik nasional yang dibangun selama masa kampanye pemilu, penetrasi elit partai politik sebagian efektif dalam mempengaruhi keterikatan warga negara dengan partai politik dan kandidat (Jurdi, 2019).

Jurdi (2019) juga menjelaskan bahwa ketika ada perubahan politik, maka melibatkan perubahan struktur kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh pertukaran elit politik yang memiliki gaya dan model kepemimpinan pemerintah antara satu sama lain. Konfigurasi elit politik di Sulawesi Selatan setelah Pemilu 2014 menunjukkan pergeseran elit, hasil pemilu menunjukkan upaya untuk "memotong" dominasi partai-partai besar dan menggeser mereka menjadi

kekuatan politik yang seimbang, Partai Nasdem merupakan fenomena unik di Sulawesi Selatan karena berhasil muncul sebagai kekuatan politik "besar", pada Pemilu 2014 berhasil menempatkan wakilnya pada posisi pimpinan DPRD Provinsi, lompatan yang sangat signifikan melampaui suara dan kursi partai-partai besar seperti PDI-P, PKB, PPP, PKS, dan partai-partai lainnya. Partai baru mengorbit elit baru dalam posisi strategis di parlemen, ini menggeser kekuatan lama.

Tabel 3. Dinamika dan Bentuk Proses Politik di Sulawesi Selatan

Tidak.	Tren Perilaku Politik Warga Sulawesi Selatan
1.	Rakyat tidak lagi bergantung pada partai politik tertentu, tetapi orientasi dan pilihan tokoh atau aktor politik menjadi praktik umum.
2.	Regenerasi politik merupakan faktor penentu dalam pemilihan partai politik.
3.	Preferensi politik rakyat bukan lagi dalam konteks pengaruh atau ketenaran aktor belaka, melainkan pada hubungan yang intens antara rakyat dan kandidat.

Sumber: Diolah dari Jurdi (2019), 2021

Berdasarkan tabel 3. di atas, dapat dikatakan bahwa proses politik yang menjadi ciri politik di Sulawesi Selatan adalah pergeseran politik dalam pertukaran elit politik yang mengarah pada perubahan struktur kekuasaan dan sedikit banyak mempengaruhi model pemerintahan keluarga tradisional. Fenomena kegagalan elit berpengaruh di Pemilu 2019 menegaskan bahwa popularitas tidak cukup untuk mendapatkan dukungan publik, ketika rakyat meningkatkan kesadaran politiknya, jaringan kekuasaan dan popularitas yang dimiliki oleh para elit penguasa tidak memberikan jaminan pasti untuk pemilihan mereka dalam proses pemilu. Sehingga keberlanjutan politik perlu didukung oleh para elit politik di Sulawesi Selatan untuk terwujudnya pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan dalam hal ini perlunya interaksi/kerja sama multi-aktor yang kompleks, dan para pelaku pasar (sektor swasta), dan masyarakat sipil.

Jika melihat proses pembangunan berkelanjutan berbasis RPJMD Sulsel 2018-2023, anda melihat proses politik harus diikutsertakan dalam proses perencanaan, melihat masyarakat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah (kontestasi politik daerah) berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan oleh elit. calon kepala daerah atau daerah. Oleh

karena itu, rencana pembangunan harus menggambarkan agenda pembangunan yang berkepanjangan (berkelanjutan) ketika kampanye (proses politik lokal) tertuang dalam rencana keberlanjutan pemerintah Sulawesi Selatan.

Struktur Kelembagaan Dasar Model Pemerintahan Lokal Sulawesi Selatan

Pada bagian ini akan dipaparkan bentuk struktur kelembagaan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. Dalam interaksi struktur kelembagaan pemerintah di Sulawesi Selatan, kita dapat melihat dalam dokumen pemerintah Rencana Kerja (Renja) Sulawesi Selatan 2021 yang membuat: (1) Dokumen Referensi pelaksanaan pembangunan daerah; (2) Dokumen referensi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta antar instansi/lembaga yang menangani pendapatan daerah baik di pusat maupun di kabupaten/kota; (3) Dokumen tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).

Dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2015 interaksi kelembagaan di Sulawesi Selatan strive untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat government. Arah kebijakan agenda ini terkait dengan misi dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD 2013-2018 yang diarahkan untuk memperkuat institusi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam arti lembaga yang kuat, andal, dan mandiri. Penguatan kelembagaan pemerintah masih mengacu pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Meski ada dinamika pembangunan lingkungan yang kuat, namun keberadaan institusi tetap mampu beradaptasi secara kreatif. Upaya pemberdayaan lembaga pemerintah akan diprioritaskan pada pelayanan publik dan pembangunan yang diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya pemberdayaan lembaga pemerintah seperti; strengthening regional government institutions; increasing

cooperation between regional governments; memberdayakan government apparatus; improving kualitas public services; research, ssesment, dan d evelopment; mengembangkan development planning; dan memberdayakan supervision diharapkan mampu menciptakan lembaga pemerintah terpercaya yang transparan, konsisten dan akuntabel serta efisien dan efektif (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).

Upaya dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap keberadaan suatu lembaga adalah dengan memahami visi dan fungsi utamanya serta mampu menerapkannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana tersirat dalam berbagai peraturan tentang pelayanan publik. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian agar memiliki kontribusi yang sangat signifikan untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik, perlu didukung keberadaan lembaga kemasyarakatan, ekonomi, dan lembaga sosial budaya yang memiliki perspektif gender. Membangun kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri dilakukan dengan membangun, membentuk, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menyediakan segala kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan lembaga sosial (organisasi keagamaan, profesional, dan pemuda dan olahraga); Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Politik (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015).

Penguatan kelembagaan dengan perspektif gender sebagai gambaran Strategi Pengarusutamaan Gender sehingga tetap mampu beradaptasi secara kreatif sehingga keberadaannya dibutuhkan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dilakukan dengan berusaha mengintegrasikan perempuan ke dalam proses pembangunan dengan tujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja perempuan, sehingga mendukung pembangunan secara lebih efektif dan efisien (Pemprov Sulawesi Selatan, 2015). Intinya, berdasarkan Renja (2015), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang interaksi struktur kelembagaan berupaya memfasilitasi keterlibatan lembaga

masyarakat dalam proses, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan pembentukan lembaga yang mampu mengubah potensinya menjadi keunggulan lokal, mengelola kekayaan budaya dan seni secara berkelanjutan. Selain itu, terkait target kelembagaan ekonomi, diharapkan pengembangan lembaga ekonomi masyarakat mandiri akan tumbuh dan berkembang secara sehat.

Jika kita melihat apa yang dilakukan Arnout et al. (2012) untuk membangun pemerintahan yang berkelanjutan dalam proses interaksi struktural kelembagaan dalam model tata kelola melalui apa yang disebut 'policy setting approach'. Hal ini mengarah pada operasionalisasi dimensi dalam hal aktor, kekuasaan, dan aturan. Dalam hal ini, tidak hanya akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Sulawesi Selatan dalam proses interaksi struktural kelembagaan tetapi juga akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan (*Sustainable Governance*).

Konten Kebijakan Mewarnai Model Pemerintahan Lokal Sulawesi Selatan

Di bawah ini akan dijelaskan terkait dengan isi kebijakan sebagai acuan/pedoman dalam tata kelola pemerintahan di kawasan, khususnya di Sulawesi Selatan, yang seperti yang dilakukan Arnout et al. (2012) untuk memperbaiki model tata kelola yang berkelanjutan lebih disukai melalui apa yang disebut 'pendekatan penetapan kebijakan'. Hal ini erat kaitannya dengan interaksi struktur kelembagaan dalam hal aktor, kekuasaan, dan aturan sebagai berikut:

Tabel 4. Uraian Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Dasar Operasional Tata Kelola Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan

No.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	UU no. 33/2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan No. 1/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023
-----	---	---	--

1.	<p>Para perumus dan pelaksana undang-undang ini berusaha menyeimbangkan kontekstualitas dan keberadaan pemerintah daerah yang lebih bijaksana atau sebaliknya dalam skema sentralisasi bayangan. Hal ini didukung dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri dari urusan pemerintahan yang absolut, serentak, dan umum. Bentuk negara kesatuan didefinisikan sebagai keseragaman daripada perbedaan.</p>	<p>Peraturan ini merupakan bentuk penunjang pelaksanaan otonomi daerah.</p>	<p>Memuat Isu dan Isu Strategis Daerah</p>
2.	<p>Peraturan ini menggunakan konsep otonomi daerah melalui sistem rumah tangga material daripada sistem rumah kurma formal dan nyata (riil). Dengan demikian, dengan adanya dekonsentrasi, suatu sistem pemerintahan memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan isu-isu strategis di daerah, dalam hal ini termasuk Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.</p>	<p>Peraturan ini juga menjadi dasar penyediaan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dan tugas administrasi bersama yang diatur melalui keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	<p>Menciptakan Visi, Misi dan Tujuan, Target Regional</p>
3.	<p>Dalam peraturan ini, pemerintah pusat dan provinsi juga diberikan kewenangan besar untuk mengawasi kota atau kabupaten. Provinsi-provinsi yang sebelumnya memiliki daya tawar yang lemah dan terbatas diperkuat dengan menambahkan lebih banyak fungsi dan kekuasaan kepada gubernur. Artinya, Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.</p>		<p>Membuat Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan, dan Program.</p>

4.	Dalam peraturan ini, efisiensi dan efektivitas diprioritaskan dengan mengikis otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah diabaikan.		Membuat kerangka kerja pendanaan pembangunan dan program aparatur daerah.
5			Berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber, 2022

Pada tabel 4 di atas dijelaskan bahwa aturan main mengenai model tata kelola yang ada di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah & 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur hubungan kewenangan, pelaksanaan, dan urusan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disebabkan oleh bentuk negara kesatuan *Indonesia*. Dalam penelitian Yusdianto (2015) model pemerintahan daerah di Indonesia mengacu pada UU no. 23/2014 tentang pemerintahan daerah yang memuat Eksistensi Pemerintah (Sebagai Penyelenggara Isu Sosial), Otonomi Daerah, Otoritas Pemerintah, serta efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian Korry (2018), disebutkan bahwa UU no. 33/2004 tentang keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di daerah Sulawesi Selatan, tdia Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2018-2023 merupakan dasar kebijakan orientasi program dan capaian pekerjaan pembangunan di Wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Selatan, perlu didukung model yang efektif untuk mewujudkan tujuan pembangunan, yaitu mengatasi ketimpangan sosial dan efektivitastata kelola pemerintahan. Tdia menawarkan tentang tata kelola berkelanjutan konseptual (*Tata Kelola*

Berkelanjutan) adalah penawaran terbaik di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan kompleksitas tingginya masalah yang terjadi that menghambat pembangunan daerah termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, kematangan demokrasi, efektivitas kebijakan dan pelestarian tal lingkungan yang berkelanjutan di wilayah tersebut menyoroti *Kolaborasi multi dimensi tata kelola berkelanjutan* yang memperhitungkan proses politik (*politik*), struktur kelembagaan (*Institutional Structure*) dan konten kebijakan (*policy*) yang cukup menangkap kompleksitas fenomena Governance (*governance*) yang terjadi. Dengan menawarkan klarifikasi konseptual yang baik tentang model tata kelola SD (*Sustainable Governance*). Ada nilai kearifan lokal budaya bugis-makassar yang mendorong model tata kelola berkelanjutan di Pemerintahan Sulawesi Selatan yaitu falsafa *Siri Na Pacce* yaitu rasa malu terhadap perbuatan tidak bertanggung jawab. Asiz et al (2015) dan Rusdi (2016) menjelaskan nilai siri na pace orang bugis makassar yaitu kode etik kearifan lokal sebagai pegangan hidup orang, senggga semua perbuatan tercelah yang tidak bertanggung jawab itu harus di hindari sebagai orang bugiis-makassar. Nilai ini lah yang dapat memperkuat eksistensi model tata kelola keberlanjutan di Sulawesi Selatan yang di rekomendasikan dalam penelitian ini, dalam mewujudkan *good government govenance* (dimana pemerintahan daerah dapat menarik manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah) (Shepherd, A., 2000).

KESIMPULAN

Perdebatan yang hidup saat ini tentang bagaimana mengatur masyarakat di jalur yang lebih berkelanjutan mencerminkan permintaan akan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang tepat dan para pendiri model tata kelola (atau campuran model) mana yang paling cocok untuk mempromosikan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan di suatu wilayah atau negara. Namun, sejauh ini tidak ada kesepakatan tentang bagaimana membedakan dan memahami model secara bermakna. Selain itu, tidak ada dasar aspek yang akan dipilih untuk upaya ini yang telah ditetapkan. Namun, kita dapat mengatakan berdasarkan penelitian

ini untuk mengisi kesenjangan pada kasus tata kelola di pemerintahan Sulawesi Selatan dengan mengembangkan meta-framework sebagai alasan untuk mengkonseptualisasikan model tata kelola yang baik. Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola pemerintahan berkelanjutan di Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan menerapkan pendekatan multi dimensi yang mempertimbangkan proses politik (*politik*), struktur kelembagaan (*Struktur Kelembagaan*), dan konten kebijakan (*kebijakan*) yang cukup menangkap kompleksitas fenomena Pemerintahan daerah Sulawesi Selatan (*form government to Sustainable governance*). Dengan klarifikasi konseptual yang baik dengan model Sustainable Governance (*Sustainable Governance*) dengan interaksi/kerja sama multi-aktor yang kompleks antara elit politik lokal, pelaku pasar (swasta) & masyarakat sipil, serta pada proses interaksi struktural kelembagaan melalui apa yang disebut dengan pengaturan kebijakan 'pendekatan'. Sebagai Ciri Has Pemerintahan Daerah Sulawesi Selatan dalam model Tata kelola Pemeritnahan daerah berkelanjutan dengan mendorong tiap pemerintahan Lokal melakukan kolaborasi dengan industry sebagai penyedia dukungan finansial pembangunan pemerintahan lokal, masyarakat sipil sebagai pengguna penlayanan publik, sektor lingkungan dimana masyarakat desa hidup, dan Universitas sebagai penyedia SDM yang berkualitas dan produsen pengetahuan inovasi daerah. Selain itu untuk mendorong model tata kelola berkelanjutan pemerintahan lokal di Pemerintahan Sulawesi Selatan, tokoh pemerintahan Sulawesi Selatan memperkuat nilai budaya kearifan lokal *siri na pacce* orang bugis-makassar sebagai nilai tanggung jawab yang tinggi dalam memerintah Sulawesi Selatan.

REFERENSI

- Adger, W. N., & Yordania, A. (Eds.). (2009). *Mengatur keberlanjutan*. Cambridge University Press (dalam bahasa Inggris).
- Ahadismal, M., Salam, M., Benyamin, I.M. (2014). Disparitas Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pasca.unhas*, 1-16. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/b70f8e5b6cae61e1ce72a87b181da8f4.pdf>

- Arnouts, R., Van der Zouwen, M. & Arts, B. (2012) Menganalisis model dan pergeseran tata kelola – Pengaturan tata kelola dalam kebijakan alam Belanda, *Kebijakan Hutan dan Ekonomi*, 16. 43–50. doi: 10.1016/j.forpol.2011.04.001
- Asiz, N. A., Mangoting, Y., & Lutfillah, N. Q. (2015). MEMAKNAI INDEPENDENSI AUDITOR DENGAN KEINDAHAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SIRI NA PACCE. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, (1), 145-156.
- Azfar, O., Kahkonen, S., Lanyi, A., Meagher, P., & Rutherford, D. (2018). Desentralisasi, tata kelola dan layanan publik: dampak dari pengaturan kelembagaan. Dalam *Devolusi dan pembangunan* (hlm. 45-88). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351160001-13/>
- Bache, I., Bartle, I., & Flinders, M. (2016). Tata kelola multi-level. Dalam *Buku Pegangan tentang teori-teori pemerintahan*. Penerbitan Edward Elgar.
- Bäckstrand, K., Khan, J., Kronsell, A., & Lövbrand, E. (2010). Politik lingkungan dan demokrasi deliberatif.: mengkaji janji model-model baru tata kelola lingkungan.
- Baker, S. (2009, Juni). Dalam Mengejar Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Tata Kelola. Int. In *Conf. dari European Society for Ecological Economics Transformation, inovasi dan adaptasi untuk keberlanjutan–Mengintegrasikan ilmu alam dan sosial, Ljubljana*.
- Bellamy, R. (2011). Simposium tentang demokrasi dan model-model baru pengenalan pemerintahan. *Pemerintah dan Oposisi*, 46(1), 56-57. doi:10.1111/j.1477-7053.2010.01329.x
- Bevir, M. (Ed.). (2010). *Buku pegangan SAGE tentang pemerintahan*. Sage.
- Burger, P., & Christen, M. (2011). Menuju pendekatan kemampuan keberlanjutan. *Jurnal Produksi Bersih*, 19(8), 787-795. doi:10.1016/j.jclepro.2010.06.019
- Callway, R. (Ed.). (2013). *Tata kelola pembangunan berkelanjutan: fondasi untuk masa depan*. Earthscan (dalam bahasa Inggris).
- Christen, M., & Schmidt, S. (2012). Kerangka kerja formal untuk konsepsi keberlanjutan–kontribusi teoretis terhadap wacana dalam pembangunan berkelanjutan. *Pembangunan Berkelanjutan*, 20(6), 400-410. doi:10.1002/sd.518

Christou, G., & Simpson, S. (2009). Tata kelola baru, internet, dan domain tingkat atas kode negara di Eropa. *Pemerintahan*, 22(4), 599-624. doi:10.1111/j.1468-0491.2009.01455.x

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Penyelidikan kualitatif dan desain penelitian: Memilih di antara lima pendekatan*. Publikasi sage.

Diedrichs, U., Reiners, W., & Wessels, W. (Eds.). (2011). *Dinamika perubahan dalam tata kelola UE*. Edward Elgar.

Driessen, P. P., Dieperink, C., Van Laerhoven, F., Runhaar, H. A., & Vermeulen, W. J. (2012). Menuju kerangka konseptual untuk studi pergeseran model tata kelola lingkungan-pengalaman dari Belanda. *Kebijakan dan tata kelola lingkungan*, 22(3), 143-160. doi:10.1002/eet.1580

Hasbi, A.M., & Semmaila, B. (2018). Analisis Disparitas Tingkat Hidup Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *JURNAL SUMBER DAYA EKONOMI*, 1(1), 31-45. <https://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/JER/article/view/46>

Hillman, K., Nilsson, M., Rickne, A., & Magnusson, T. (2011). Membina teknologi berkelanjutan: kerangka kerja untuk menganalisis tata kelola sistem inovasi. *Sains dan Kebijakan Publik*, 38(5), 403-415. <https://doi.org/10.3152/030234211X1296031526749>

Homeyer, I. V., & Framework, E.C. (2006). Makalah EPIGOV No. 1, Ekologi-. *Institut Kebijakan Lingkungan Internasional dan Eropa: Berlin*.

Hooghe, L., & Marks, G. (2001). Jenis tata kelola multi-level. *Makalah online integrasi Eropa (EIoP)*, 5(11). doi: 10.2139/ssrn.302786

Howlett, M., Rayner, J., & Tollefson, C. (2009). Dari pemerintahan ke tata kelola dalam perencanaan hutan? Pelajaran dari kasus inisiatif British Columbia Great Bear Rainforest. *Kebijakan dan ekonomi hutan*, 11(5-6), 383-391. doi:10.1016/j.forpol.2009.01.003

Jordan, A., Wurzel, R. K., & Zito, A. (2005). Munculnya instrumen kebijakan 'baru' dalam perspektif komparatif: apakah pemerintahan telah melampaui pemerintahan?. *Studi politik*, 53(3), 477-496. doi:10.1111/ j.1467-9248.2005.00540.x

Jurdi, S. (2019). Pergeseran dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian dan Analisis terhadap Dinamika Politik di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, 7(2), 157-177. <https://core.ac.uk/download/pdf/276535034.pdf>

Kemp, R., Parto, S., & Gibson, R.B. (2005). Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan: bergerak dari teori ke praktik. *Jurnal internasional pembangunan berkelanjutan*, 8(1-2), 12-30. Doi: 10.1504/IJSD.2005.007372

Komisi Eropa (2009) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam Kebijakan UE: Tinjauan 2009 tentang Strategi UE untuk Pembangunan Berkelanjutan. COM (2009) 400 final (Brussels: Komisi Eropa)

Kooiman, J. (2003). *Pemerintahan sebagai pemerintahan*. Sage.

Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *KERTHA WICAKSANA*, 12(1), 76-79.
<https://doi.org/10.22225/kw.12.1.414.76-79>

Lafferty, W.M. (2004). Pendahuluan: bentuk dan fungsi dalam tata kelola pemerintahan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam *Governance for Sustainable Development: Tantangan beradaptasi bentuk dengan fungsi* (hlm. 1-31). Edward Elgar Penerbitan Terbatas.

Lange, P., Driessen, P. P., Sauer, A., Bornemann, B., & Burger, P. (2013). Governing towards sustainability—mengkonseptualisasikan model tata kelola. *Jurnal kebijakan & perencanaan lingkungan*, 15(3), 403-425.
<https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.769414>

Lange, P., Driessen, P. P., Sauer, A., Bornemann, B., & Burger, P. (2013). Governing towards sustainability—mengkonseptualisasikan mode tata kelola. *Jurnal kebijakan & perencanaan lingkungan*, 15(3), 403-425.
<https://doi.org/10.1080/1523908X.2013.769414>

Lowndes, V., & Skelcher, C. (1998). Dinamika kemitraan multi-organisasi: analisis perubahan model tata kelola. *Administrasi publik*, 76(2), 313-333.
<https://doi.org/10.1111/1467-9299.00103>

Lynn Jr, L. E., Heinrich, C. J., & Hill, C. J. (2001). Meningkatkan tata kelola: Logika baru untuk penelitian empiris. *Pers Universitas Georgetown*.

Meadowcroft, J. (2007). Siapa yang bertanggung jawab di sini? Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan di dunia yang kompleks. *Jurnal Kebijakan & Perencanaan Lingkungan*, 9(3-4), 299-314. doi:10.1080/15239080701631544

Meier, K. J., Compton, M., Polga-Hecimovich, J., Song, M., & Wimpy, C. (2019). Birokrasi dan kegagalan politik: Tantangan terhadap pemerintahan yang

demokratis. *Administrasi & Masyarakat*, 51(10), 1576-1605.
<https://doi.org/10.1177/0095399719874759>

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldaña, J. (2018). *Analisis data kualitatif: Buku sumber metode*. Publikasi sage.

Pemerintah Sulawesi Selatan. (2015). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Sulawesi Selatan 2015. *Dalam Documen*. Pemprov Sulawesi Selatan.

Pemerintah Sulawesi Selatan. (2018). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2018-2023. *Dalam Documen*. Pemprov Sulawesi Selatan.

Rhodes, R. A. (1997). *Memahami tata kelola: Jaringan kebijakan, tata kelola, refleksivitas, dan akuntabilitas*. Universitas Terbuka.

Rogge, K. S., & Reichardt, K. (2016). Bauran kebijakan untuk transisi keberlanjutan: Konsep dan kerangka kerja yang diperluas untuk analisis. *Kebijakan Penelitian*, 45(8), 1620-1635.
<https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.004>

Rusdi, M. I. W. (2016). *NILAI BUDAYA SIRI'NA PACCE DAN PERILAKU KORUPSI* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Seni, B., Leroy, P., & Van Tatenhove, J. (2006). Modernisasi politik dan pengaturan kebijakan: kerangka kerja untuk memahami perubahan kebijakan lingkungan. *Tinjauan organisasi publik*, 6(2), 93-106. doi:10.1007/s11115-006-0001-4

Shepherd, A. (2000). Governance, good government and poverty reduction. *International Review of Administrative Sciences*, 66(2), 269-284. Governance, Good Government and Poverty Reduction Andrew Shepherd First Published June 1, 2000 Research Article <https://doi.org/10.1177/0020852300662004>

Smismans, S. (2008). Model pemerintahan baru dan mitos partisipatif. *Politik Eropa Barat*, 31(5), 874-895. doi:10.1080/01402380802234540

Stoker, G. (2018). Pemerintahan sebagai teori: lima proposisi. *Jurnal Ilmu Sosial Internasional*, 68(227-228), 15-24. doi: 10.1111/issj.12189

van Zeijl- Rozema, A., Cörvers, R., Kemp, R., & Martens, P. (2008). Tata kelola untuk pembangunan berkelanjutan: kerangka kerja. *Pembangunan Berkelanjutan*, 16(6), 410-421. <https://doi.org/10.1002/sd.367>

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum Padjadjaran*, 2(3), 483-504. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>